

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu Pradipta
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Januari 1986
Alamat : Jl. Rajawali VII BP17 no.1 Perumahan
Kranggan Permai, Jakasampurna, Bekasi
Nomor Telepon, Surat Elektronik : 081380088315, w_pradipta@yahoo.com
Nama Orang Tua : Ayah : Syafzali BK
Ibu : Reny Andryani

Riwayat Pendidikan formal:

SD : SD Don Bosco II Pulomas
SMP : SLTP Don Bosco II Pulomas
SMA : SMU Negeri 21 Pulomas





LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Latar Belakang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

- Mengapa Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan?
- Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk apa?
- Arti otonomi daerah menyangkut masalah pendapatan asli daerah maupun pendapatan daerah.

Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- Cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peningkatan pendapatan asli daerah

Proyeksi ke depan Pendapatan Asli Daerah

- Apakah pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintahan kabupaten Bekasi?
- Apakah pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat terus menjadu sumber pemasukan yang utama bagi pemerintah daerah?

Transkrip Wawancara

Nama : R. Yana Suyatna, SIP, M.Si
H. Nana Supriatna, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Bid. Pembukuan dan Pelaporan
Kepala Bagian Bid. Pendaftaran dan Pendataan
Tanggal : 2 Mei 2008
Pukul : 13.00 – 15.00
Tempat : Ruang Tunggu kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

(Suara berisik dari orang berbincang-bincang di luar ruangan)

Yana Suyatna (YN): Harus dibarengi dengan pelayanan yang lebih baik, jadi kalo bisa dengan system jemput bola.

Wahyu (W): Jemput bola??

YN: Mereka sudah aaaa berkurang kesadaran kesadaran untuk mambayar pajaknya.

W: Oh gitu...

YN: Jadi mereka berupaya (suara orang berbicara di luar) pelaporannya, gimana harus membayar seperti di pajak pusat kan mereka menghitung sendiri, lapor sendiri.

W: *Self assessment* gitu?

YN: Iya kalo kita *self assessment* memang tidak ada keberatan jenis pajak yang sudah ada tapi kalo seluruhnya diberlakukan untuk rumah makan atau warung-warung yang punya orang daerah maka dengan membayar 20 ribu atau 30 ribu dia datang kesini aslinya ongkosnya ga nutup. Ya coba jadi kita menjemput bola, sistemnya biasa sih tetapi prosedurnya seperti itu jadinya kita coba menjemput bola..

W: Iya menjemput bola ya... Tetapi saya lebih tertarik dengan yang kedua, Optimal dalam...

YN: ...pendapatan daerah.

W: Karena kan optimal lebih ke arah peningkatan, bentuk konkrit dari visi yang optimal?

YN: Sebenarnya visi misi itu dibuat oleh seluruh karyawan bukan untuk diterapkan oleh seorang, kita terbelenggu oleh jenis pajak yang ada di dalam pasal, yang ada di dalam UU no 18 (ttg pajak daerah dan retribusi daerah) tanpa mengembangkan pendapatan yang lain. Jadi itu yang pertama, yang kedua yang melatarbelakangi karena kesadaran wajib pajak yang rendah itulah, yang dianggap mempengaruhi pendapatannya. Dampaknya tunggakan karena proses penagihan kan terus berlanjut sebulan sekali setelah ditetapkan SKPDnya, tapi tanpa dibarengi dengan kesiapan perangkat hukum eh... dibarengi dengan sistem dan prosedur yang lebih dipahami, efektif, efisien kejelasannya. Sehingga itu ada dua kebijakan, yang pertama ekstensifikasi yang melahirkan pajak sarang burung wallet

W: Pajak baru ya pak?

YN: Pajak baru, walaupun memang sudah dua visi sudah dua kali dicoba dibicarakan, dibahas, ternyata tetap mereka eh pada optimal dengan pendapatan daerah cuman

lebih pada intensifikasi saat ini. Intensifikasi dengan penyiapan perangkat atau pegawai auditor pajak

W: Auditor pajak?

YN: Kita kerjasama dengan BPKP, sebetulnya tidak wajib dari ini sih eh apa istilah perpajakan itu sudah penagihan aktif, kalo penagihan pasif kan kita menunggu sampai waktu jatuh tempo, gitu aja kan setelah itu kita kebingungan tunggakan banyak tapi harus melakukan langkah apa? Salah satunya dengan membentuk tim audit pajak, kita juga sudah membentuk tim juru sita cuman kan juru sita hubungannya dengan peradilan perpajakan. Nah ini yang langkahnya lagi....

W: Sudah pakai juru sita belum?

YN: Juru, cuman kita hanya sebatas menakuti2 saja, kalau kita nego ngga bisa nah kita juru sita nanti ada tim audit, yang memang tidak signifikan, tapi untuk menambah pendapatan yah lumayanlah. Terus yang lainnya dengan cara pendaftaran calon wajib pajak, jadi memang ada insentif buat mereka.....

W: Apa tuh bentuk insentifnya???

YN: Insentifnya itu semakin banyak mereka mendapatkan calon wajib pajak, mereka akan diberi penghargaan berupa uang gitu yah. Satu NPWP sekian rupiah nanti Pak Nana yang lebih tau...

W: Oh insentifnya untuk pegawai dari sini, maksudnya insentifnya diberikan pada petugasnya yang mendata?

YN: Menjaring, menyaring wajib pajak baru. Kaya kalo ada orang lagi bikin pondasi aja.. Kira2 ini untuk apa nih??? Untuk pabrik misalnya, Nah ini calon wajib pajak baru untuk saya nanti (sambil tertawa)... Yah buat apa, intensifikasi nah yang lain seperti peninjauan perda-perda yang dianggap sudah tidak layak

W: Kebetulan itu kemaren ada di jawaban tentang perda..

YN: Kita sekarang itu yah... Kita sekarang lagi membahas reklame.. mudah-mudahan bisa dan ini sudah dibicarakan jadi nanti harga dasar sewa pajaknya...

W: Tapi bukan reklame itu tergantung penempatannya???

YN: Tergantung penempatan, tergantung bahan jadi intinya sih kalo dari kita tergantung dari jalan strategisnya (klas abc), satu pandang atau 2 pandang, kalo dari mereka tergantung dari berapa besar mereka membuat reklame, kalo membuat reklame mereka bisa ratusan juta yah sesuai dengan ketentuan pengalihannya emang besar cuman harga dasar pengenaannya kita terlalu kecil dibandingkan dengan Bekasi, kota Bekasi ,Depok, Bogor, kebetulan kemarin saya meninjau. Kita seperlimanya dari mereka,

W: Oh gitu??

YN: Ukuran 1 X 2 saja di kita masih 185 ribu di mereka sudah 400an sampai 500rb Jadi kita 500% di bawah Karawang juga jauh dengan DKI

W: Berarti itu termasuk ini yah.... Bisa jadi strategi untuk meningkatkan??

YN: Yah betul... Dari penambahannya???

- W: Tapi sebelum kita jawab ke yang itu saya... Pertanyaan pertama saya sebenarnya target PAD tahun kemarin sudah sesuai belum dengan kebutuhannya sebagai salah satu pendapatan daerah (1)
- YN: Sesuai dengan?
- W: Jumlah pendapatan asli daerah kabupaten Bekasi ini sudah sesuai belum dengan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan pembangunan?
- YN: Belum. Kita kan cuman 195 milyar, APBD sendiri masih satu koma.... Yah cuman sepuluh sekian persen sebelas duabelas %lah dari APBD yah kita masih kecil makanya kita mengutamakan sebetulnya di perimbangan. Potensi kemarin dari pendataan Bapeda, untuk kawasan aja, pajak pusat dari kabupaten yang disetorkan pada Negara kita lebih 30 trilyun kalo ga salah.
- W: Dari kabupaten?
- YN: Kalo perimbangan ga usah 70-30% tetapi 10 persen aja itu sekitar 3 trilyun - 4 trilyun cukup sih..
- W: Tapi pajak yang disetorkan ke pusat itu sistemnya bagi hasil atau sepenuhnya punya pusat???
- YN: Bagi hasil
- W: Bagi hasil...
- YN: Cuman rumusannya memang, sebenarnya perimbangan yang biasa menghitung itu, karena ada potensi daerah yang tidak dimasukkan ke dalam, eh mksdnya pengeluaran, misalkan APBD kita tinggi, terus pemasukan untuk Negara dari pajak pusat itu tinggi nah dikurang dari APBD makanya kita kalah dngan Garut, Garut PADnya kecil tetapi orang miskinnya banyak jadi lebih besar..
- W: Oh dana perimbangannya. Kan kita PAD sama potensi di daerahnya cukup bagus.
- W: Potensi apa aja pak??
- YN: Yah PAD itu. Pajak daerah.
- W: Dari data yang ada disini sih kemaren saya itung2 kan ada nih pajak 2001-2005 emang sih belum sampai 20% cuman udah cukup... kaya saya waktu itu cerita suatu daerah yang otonom sebenarnya bisa mencapai 20% dari jumlah APBDnya... pendapatan asli daerahnya paling tidak 20%...
- (Pak Nana memasuki ruangan)
- YN: Ini pak Nana. Ini sedang penelitian untuk skripsi... Tadi sudah saya jelaskan mengenai pelayanan prima... Sudah menjadi suatu kebangganlah karena kita sistemnya dengan wajib pajak tuh sebagai mitra bukan sebagai objek pajak kita. Mereka dihargai oleh kita karena peran merekalah pembangunan di kota Bekasi jadi kita harus memberikan pelayanan lebih dan visi yang kedua optimal dalam pendapatan daerah karena dari pengalaman banyaknya tunggakan-tunggakan maka kita memiliki dua strategi, ekstensifikasi dan intensifikasi, ekstensifikasinya kan kita udah ada pajak di luar UU yaitu pajak sarang burung walet, Intensifikasinya sperti kita membuat tim auditor pajak, terus kita ada juru sita walaupun operasionalnya belum terlalu aktif tapi untuk kita masih ada senjata terus peninjauan perda2 yang sudah ketinggalan jaman. Terus untuk peran PAD dari APBD, APBD kan trilyunan

- sedangkan PAD memang kecil tapi sebetulnya kalo ada dana perimbangan yang signifikan thd potensi yang ada aja dari pusat maka kita bisa lebih besar kaya tadi kalau perimbangan 70-30%. Kalau diperlakukan seperti itu maka kita lumayan 9 – 10 trilyun untuk APBD tanpa membuat perda tentang pajak yang nilainya kecil
- W: Jadi cara2 yang melalui ekstensifikasi objek pajak kurang memberikan hasil?
- YN: Optimal makanya. Kita ada 4 draft ekstensifikasi, seperti rumah kontrakan yang dipersiapkan thn 2002-2004 hanya yang punya rumah kontrakan itu pejabat atau pejabat publik jadi ada dampak sosial dan dampak politisnya
- Nana Supriatna (NS): Saya kira itu alasannya kurang ini juga... Karena rumah kontrakan itu yang punya kan orang-orang yang berpenghasilan menengah kebawah artinya kalau rumah kontrakan tersebut dikenakan pajak maka dia akan membebankan pada masyarakat jadinya makanya rumah kontrakan itu tidak diwajibkan bukan karena hanya pemilikinya, apalagi karena pemilikinya pejabat, tetapi itulah...
- YN: Tetapi ada juga mereka menyikapi untuk tidak dikenakan pajak
- NS: Yah itu karena dalam peraturannya 10 pintu maka sengaja dipecah2 agar tidak kena pajak (tertawa). Yang ini untuk anak pertama lalu untuk anak kedua lain lagi..
- W: Jadi memang untuk ekstensifikasi tuh terbentur masalah sosial juga???
- YN: Ada lagi rencana pengenaan pajak untuk 2 KBU, yang digunakan untuk telepon tetapi terbentur pajak pusat, pajak penghasilan, walaupun di daerah sangat tumbuh dan lain lagi material karena kendaraannya tronton dan kelas jalan di kecamatan masih jalan kelas tiga sehingga jika kendaraan material lewat akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Jadi itu kita coba kenakan pajak. Dan ada satu lagi yang masih dalam wacana yaitu pajak rumah sakit, karena tujuan rumah sakit udah bukan sosial lagi tetapi lebih pada *profit*.
- NS: Belum apa-apa sudah harus menaruh uang jaminan.
- YN: Sebagai bentuk kepedulian daerah maka kita coba untuk mengenakan pajak terhadap rumah sakit agar tidak terlalu memikirkan profit tetapi ternyata didalamnya juga terdapat pajak pusat. Pemikiran kita banyaklah untuk jenis pajak baru, untuk berkreasi2 lah namun ya... Berbenturan dengan masyarakat, dengan pajak pusat dan nilainya ga terlalulah... Terlalu banyak..
- W: Jadi tidak efektif yah?? Hasilnya kecil namun biaya pemungutannya? Bisa ngga bapak menjelaskan secara konkrit kewenangan, kan kemarin setelah desentralisasi ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan tadi sudah dijelaskan mengenai ekstensifikasi pajak...
- YN: Mengenai desentralisasi fiskal yah?
- W: Selain membuat pajak baru...
- YN: Sebetulnya kalo melihat pada UU no 34/2000 ttg pajak daerah, kita sudah dibatasi bahwa pajak yang dipungut oleh daerah hanya 8 yang disebutkan disitu.. Sebetulnya sisdur kita ada permen 43, memasukan berd kode rekening no 13
- NS: 13...
- YN: Paling yang kita intensifikasikan saja... Kaya peraturan yang harga dasar pengenaannya yang memang di pusat tidak ditentukan nilai maksimalnya berapa,

bentuk regulasinya tidak dijelaskan tapi paling kita studi banding dengan daerah di sekitar kita. Itupun kita suka melauai pergub karena melalui perda prosesnya panjang dan perlu biaya lagi karena perlu persetujuan dewan. Karena itu kita coba melalui bupati yang lebih profesional nah ini Inilainya yangselama ini perubahannya tidak terlalu memberatkan karena kita kan punya alasan-alasan

NS: Yah di satu sisi boleh ekstensifikasi tetapi pada akhirnya tergantung pusat. Kemaren sudah ada perda ttg limbah. Ternyata setelah, sudah lewat eksekutif dan dewan sudah menyetujui bahkan gubernur namun ditolak oleh pemerintah pusat, dikembalikan..

W: Kan setahu saya bisa direvisi juga??

YN: Substansinya termasuk pajak pusat karena limbah bisa diolah lagi lalu menjadi pajak penghasilan. Artinya desentralisasi fiskal sebenarnya tetap kewenangan pusat ikut campur.

W: Jadi pemerintah daerah seperti pemkab tidak mempunyai...

YN: Kewenangan. Seperti sekarang saja akhirnya terbiasa karena memang birokrasi itu tipe yang taat hukum jadi kalau mau bergerak belum ada PPnya, belum bisa ngapa2in. Pdhl kita sering bertanya dalam peraturan perundangan, permen itu tidak termaduk bhakan kita juga PP dan kalo orang politik bisa gitu. Di pusat misalkan baru saja disahkan maka orang politik bisa menggunakan, konsumsi politiklah, dengan disahkannya di pusat orang politik bisa menyampaikan pada pendukungnya, gratis ini dalam rangka promosi, padahal belum bisa diterapkan dan masyarakat tidak mau tahu lagi. Walaupun perorangan. Hal inilah yang menjadi suatu kendala yang di datu sisi kita bebab di sisi lain yah kita nunggu

W: Tadi kan bapak udah menjelaskan mengenai ekstensifikasi dan intensifikasi, kira-kira adakah faktor yang mendukung peningkatan PAD?

NS: Tadi yah kesadaran...

W: Kesadaran masyarakat?

NS: Ho oh... masyarakat sadar, yang pertama memang sangat penting jika kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu tinggi karena bagaimanapun mereka juga yang bayar pajak. Kedua, kondisi perekonomian.

YN: Kesadaran ada tapi misalkan kalo secara riil mah ada uang “jago , pungutan liar, nanti ada polisi juga datang minta bagian. Tidak dilayanin ngerusak, dilayanin akhirnya mempengaruhi pajak. Khirnya mereka rekayasa omzet gitu terus mereka minta bimbingan, modal yah kita khan bukan lembaga permodalan (sambil tertawa)

W: Di salah satu misi yang ada di buku profil kan tercantum meningkatkan kondisi perekonomian daerah mungkin ini terkait dengan hal yang tadi bapak sebut mengenai kondisi perekonomian, sdm dan kualitas pelayanan. Bentuk konkrit praktek mengenai peningkatan perekonomian daerah ini bagaimana ya pak??

YN: Kalau saya melihatnya dari output sdm, kondisi sumber daya manusianya dan kualitas pelayanan akan berdampak pada peningkatan keuangan daerah

W: Oh gitu

YN: Kalau saya melihatnya semacam itu.. Tapi kalau saya dulu arahny ke.... Jadi kalau sdm khan.. mksd misi itu kan peningkatan dari kita... Misalkan gini, ekstensifikasi

pajak hotel misalnya dulu kita kenakan pajak hanya pada tingkat hunian, ternyata setelah kita kaji dan konsultasi dengan dinas yang berkaitan, pajak hotel termasuk laundry, restoran itu menambah gitu yah... Kemudian untuk pelayanannya, kalau hanya menunggu untuk mereka yah kapan gitu... Yah udahlah kita yang berkorban untuk menjemput tetapi memang kita tatap tidak menerima uang, untuk menghindari *image* bahwa dipenda itu menerima uang, maka lgs disetorkan ke Bank Jabar. Nah untuk pengelolaan keuangan saya lebih cenderung untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku seperti peraturan mengenai keuangan daerah.

W: Berarti misi ini kaitannya dengan faktor pendukung dimana jika ini berjalan dengan baik maka akan mendukung kemampuan pembangunan daerah

YN: Lalu ada satu lagi yaitu fungsi dipenda sebagai koordinator dinas-dinas penghasil.

W: Maksudnya apa tuh pak??

YN: PAD kan tidak hanya pajak daerah tetapi juga retribusi daerah, nah ini merupakan tanggung jawab dinas-dinas yang bersangkutan. Dipenda sebagai koordinator sebulan sekali melakukan evaluasi dinas, pembinaan dan pembukuan retribusi daerah kemudian termasuk dinas-dinas penghasil mewariskan perda jgn sampai tumpang tindih. Misalkan dinas pariwisata membuat perda tentang pungutan tempat-tempat rekreasi jgn sampai tumpang tindih dengan pungutan oleh dinas lain. Maka dipenda diberikan kewenangan sebagai koordinator untuk mengingatkan bahwa pungutan itu merupakan kewenangan dinas yang lain.

W: Biar ga tumpang tindih gitu..

YN: Iya biar ga tumpang tindih. Iya itu tadi kaitannya dengan faktor pendukung peningkatan PAD

W: Terus mungkin faktor penghambatnya apa pak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah???

NS: Penghambat??

W: Tadi faktor pendukung nih... Kalo pendukung kan ada dijelaskan disini, kalo penghambatnya kira-kira apa yah pak?

NS: Masih ada masyarakat yang kurang sadar terus kalo liat dari bidang-bidang yang ada di bidang-bidang yang ada di DKI, kesejahteraan kita masih jauh..

W: Berarti kondisi ekonomi juga mungkin yah

YN: Iya.. seperti tadi dibidang kondisi ekonomi nasional juga mempengaruhi, bagaimana mereka... Lancarnya tidaknya pembayaran pajak terus bgmn mereka mengajukan ijin perijinan. Banyak faktor yang menghambat.

W: Tadi... maaf tadi bapak menyebut dinas-dinas penghasil.. Itu contohnya apa yah???

NS: Contohnya dinas penataan dan pengolahan terencana yang mengurus retribusi ijin pembangunan, IMB, ijin sarana lalu dinas pasar yang mengurus retribusi kebersihan pasar

W: Oh itu berarti tergantung jika dinas tersebut mempunyai penghasilan maka dipenda sebagai koordinator dalam mengelola penghasilan tersebut.

NS: Tapi kita juga tidak ikut intervensi dalam melakukan pungutan retribusi. Mereka yang melakukan, kita hanya merekap saja kemudian bahkan untuk bupati, eksekutif hanya

- menyampaikan terus ini sudah evaluasi, evaluasi tahapan. Kita hanya mengkoordinir kegiatan atau penyusunan kebijakan. Target retribusi
- W: Ada skala prioritasnya ga sih pak?? Dari tadi cara-cara udah bapak jelasin, ada sih cara yang paling utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?? Ada ga??
- NS: Kalo prioritas, kalo untuk pajak saya kira sudah ada target, masing2 pajak daerah dimana sudah menjadi tugas kita untuk mengejar target yang telah ditentukan dalam tahun anggaran... Target kita kenaikan 10%an per tahun
- W: Kenaikan atau jumlah???
- YN: Kenaikan pajaknya tapi memang tergantung kondisi perekonomian juga yah... jadi dari ijin lokasi aja, kalo kondisinya melemah orang mana mau membebaskan tanah berapa ratus hektar gitu yah
- (Pak Yana meninggalkan ruangan untuuk sholat)
- W: Dari bapak sendiri sebagai kepala bagian pendataan dan pendaftaran, cara-cara yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah??
- NS: Saya mewakili dari bidang pendataan dan pendaftaran dulu yah.. Dari pendataran tugas kita mencari... Menjaring wajib pajak baru, itu suatu kegiatan intensifikasi pajak daerah, kedua mengadakan survey, survey ini berguna untuk menjaring wajib pajak secara otentik untuk membuat atau menghitung wajib pajak untuk tahun yang akan datang. Jadi tahun ini kita survey untuk tahun 2009 gitu.
- W: Survey yang dilakukan selama ini sudah memberikan hasil???
- NS: Saya beri contoh pajak hotel misalnya, tahun lalu dia hanya menyediakan 100 kamar nah kan ke dapannya kita ngga tau apakah dia akan ekspansi usaha atau tidak. Bisa saja dari 100 kamar ini untuk tahun depan ada pengembangan, artinya kalo ada pengembangan ka nada pengaruh terhadap jumlah pajaknya sendiri dengan bertambahnya jumlah kamar ini tentunya pendapatan juga akan bertambah dengan sendirinya pajak ini juga akan meningkat
- W: Bagaimana dengan wajib pajak yang baru yang tadi bapak bilang?? Itu juga selama ini ada hasil yang signifikan ngga pak???
- NS: Bagaimana maksudnya??
- W: Kan tadi bapak menyebutkan menjaring wajib pajak..
- NS: Yah justru dengan menjaring wajib pajak baru ini akan menambah...
- W: Maksud saya sudah ada... mksdnya menjaring wajib pajak baru itu sudah berhasil atau..??
- NS: Kita kalo disini kita targetkan 100 wajib pajak baru tiap tahun anggaran. Itu berbagai jenis pajak yah... Dengan berbagai jenis pajak yang diterapkan disini. Tapi dari 18 ini yang potensial ada tiga sih pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran. Hah ada kita pajak penggunaan energi listrik, karena kita kawasan industri ini pajak energi listrik, pajak penggunaan energi listrik. Nah pajak penggunaan energi listrik inikan ada tiga di kita, ini di daerah lain belum ada yah, pertama PLN, penyediaan oleh swasta dan genset. Hah ini biasanya banyak dari swastanya.
- W: Berarti itu mungkin salah satu keuntungan kawasan industri daerah kabupaten
- NS: Yah dapetnya itu, untungnya kawasan industri ini bagi kita ya ituh, ada kontribusi

- W: Ada pajak lain pak dari....
- NS: Ada pajak parkir, dengan semakin maraknya mall apa ini, apa yah pajak inilah gitu..
- W: Oh gitu yah pak... Tadi bapak sudah bilang tentang wajib pajak baru, survey terus ada lagi pak dari bidang pendataan dan pendaftaran??
- NS: Kita mengadakan semacam kunjungan kerja ke masing-masing RT yah, maksudnya sih dalam rangka tugas juga. Kalo tugas yah kita lakukan secara rutin berdasarkan jadwal, kalo kunjungan kerja ini kita lakukan secara informal...
- W: Informal???
- NS: Informal, jadi kalo ada permasalahan di wajib pajak misalnya, wajib pajak ini terlambat atau tidak suka bayar pajak atau nunggak nah ini kami dengan tim melakukan kunjungan kerja untuk mengetahui permasalahan yang ada. Itu juga efektif juga. Memang banyak juga wajib pajak yang senangnya secara informal. Jadi ada sedikit ini yah... Ngaa terlalu formal
- W: Ngga terlalu kaku gitu??
- NS: Ngga terlalu kakuuu... Nah disini ada gunanya juga..
- (Pak Yana kembali dari sholat)
- W: Jadi hubungan antar ini juga penting yah... Antar unit dari pemerintah sama wajib pajak??
- YN: Iya bahkan juga dengan unit pemerintah lain atau dinas-dinas yang ada. Misalkan ada perusahaan yang melalaikan kewajiban pajaknya maka kita bersama tim akan mengirim data ke deperindag bahwa perusahaan ini tidak membayar pajak, maka mereka tidak akan mengeluarkan ijin usahanya
- W: Ohh gitu.. Kerjasama antar instansi juga penting yah????
- YN: Iya... iya....
- W: Menurut bapak bapak ini pengelolaan pajak retribusi pokoknya semua PAD itu kira2 untuk jangka waktu 5 tahun masih potensial atau sudah harus mencari strategi lain???
- NS: Yah memang kita sesuai dengan renstra yang 5 tahun sekali diganti maka harus ada peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan renstra itu maka setiap tahu harus ada peningkatan sekitar 10%.
- W: Maksud saya jika target tersebut tidak tercapai gitu, apakah ada mempersiapkan cara-cara lain??
- YN: Cara B???
- W: Iya kalo seandainya tidak tercapai???
- YN: Hmmm.. Iyah kalo kita perhitungannya berdasarkan potensi yang ada jadi sudah ditimbang2 apabila satu bangkrut kita sudah punya potensi lain. Seperti peribahasa "burung di tangan jangan dilepas burung yang di pohon coba kita tangkep gitu , jangan sampe yang di tangan lepas yang di pohon ngga dapet (sambil tertawa), kita juga sedang menunggu perubahan UU 34 yang paling baru yah... Karena disitu ada potensi golf, potensi kita kan banyak.. Kita ada beberapa, yah sebagai penambah saja sebagai salah satu objek pajak.
- W: Tapi tadi bapak menyebut memang masih sangat tergantung pada dana perimbangan??

- YN: Sangat tergantung pada pemerintah pusat. Walaupun kita menganggap tidak adil yah
- W: Yah bagaimana pendapat bapak mengenai masalah desentralisasi fiskal. Seharusnya kan wewenang untuk mengelola anggaran besar tetapi ternyata masih bergantung pada pemerintah pusat.
- YN: Untuk masalah mengenai keuangan daerah mungkin bisa mampir ke biro keuangan, kita kan disini lebih pada operasionalnya saja. UU nya sudah ada PP 65 dan 66. Kita bergerak berdasar itu saja. Sebenarnya apabila perimbangan layak atau manusiawi aja kita ngga perlu banyak pajak. Untuk Bekasi ga usah 30 persen, 10 % aja sudah cukup untuk pembangunan dan penyelenggaraan. Lima persen juga cukup, kita ga usah banyak-banyak pajak daerahnya pokoknya Bekasi bebas.
- W: Memang selama ini dana bagi hasil itu tidak sesuai dengan... Kan sudah ada perumusannya, pembagiannya 70-30 atau bagaimana???
- YN: Engga, engga begitu. Mungkin alasannya ngga etis, jadi kita sebagai yang punya kawasan industri, ketika masalah bagi hasil itu, disitu sama. Hasil pajak yang diambil dari sini itu, karena kita NKRI, semua pajak itu dibagikan secara merata dengan daerah lain.
- W: Untuk pemerataan mungkin
- YN: Iya
- W: Jadi kabupaten sendiri merasa cukup dirugikan atau gimana??
- NS: Yah jelas, kalau saya merasa dirugikan juga orang kita yang terbesar kontribusinya tapi kenyataannya kan...
- W: Sebenarnya pertanyaan saya hanya segitu saja tapi tadi yang menarik mengenai masalah desentralisasi. Sebenarnya desentralisasi kan pelimpahan wewenang kepada daerah tapi kalau ternyata ketika berjalan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat kan ada kesimpulan yang bisa saya ambil. Mungkin pemerintah pusat belum siap untuk melepas..
- NS: Yah mungkin memang gitu dengan PAD yang hanya 25% dari total APBD yah...
- W: Sebenarnya data malah menunjukkan bahwa PAD nya tidak sampai 20 % selama 5 tahun berjalan padahal kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri
- NS: Yah hal ini terkait dengan pertanyaan yang tadi, seandainya ada pembagian hasil yang adil, kita tidak perlu banyak-banyak pajak daerah.
- W: Dengan jumlah yang hanya segitu, selama ini ada masalah tidak dalam penggunaan pendapatan daerah????
- NS: Pasti adalah dengan jumlah yang hanya segitu pasti akan menghambat pembangunan dan penyelenggaraan. Yang jelas pengeluaran pasti akan disesuaikan dengan pendapatan.
- YN: Tetapi ada suatu peran yang sangat penting yah... Pertama apabila kita ngandalin DAU kan tidak setiap bulan turun yah, terus kalo kita ngandelin PBB juga kita di akhir tahun baru bisa mendapatkan pendapatan sedangkan pembangunan berkesinambungan itu kan harus terus berjalan. Sulit untuk terus mengharapkan pajak tetapi sebenarnya pajak penggunaan energi listrik itulah yang cukup signifikan dalam membantu pengeluaran daerah.

W: Mungkin segitu saja yah pak, nanti kalau ada masalah yang perlu ditanya akan saya hubungi lagi... Terima Kasih Pak
YN & NS: Iya sama-sama...

